

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**KANTOR WILAYAH DJP**

**SUMATERA BARAT DAN JAMBI**

**LAPORAN KINERJA (LAKIN)**

**TAHUN 2024**



**KANTOR WILAYAH DJP**

**SUMATERA BARAT DAN JAMBI**

# PENGANTAR

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024, dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi dibuat dalam rangka pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam pencapaian visi dan misi yang dibebankan kepada Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi. LAKIN ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kerja secara kuantitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan dalam rangka perwujudan *good government* Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi secara berkesinambungan.

Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak ini merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, nilai, tujuan, sasaran strategi, program dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.

Dalam menjalankan Rencana Strategis tersebut di atas seluruh aparaturnya Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi telah disatukan dalam visi yang berbunyi sebagai berikut:

*“Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa Untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan; Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan.”*

Dengan mengacu kepada Misi Direktorat Jenderal Pajak, maka misi Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi adalah:

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Dengan menyatakan visi dan misi tersebut terkandung maksud agar seluruh aparat Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi memiliki pemahaman dan komitmen yang sama untuk bersama–sama mengamankan penerimaan negara untuk terciptanya kemandirian negara dalam membiayai jalannya pembangunan.

Pelaksanaan Visi dan Misi Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi sejalan dengan Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak beserta perubahannya pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, dimana Kantor Wilayah memiliki tugas melaksanakan analisis, penjabaran, koordinasi, bimbingan, evaluasi, dan pengendalian kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang pajak dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu saran dan masukan sangat diharapkan untuk penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) yang lebih baik di tahun-tahun yang akan datang.

Padang, 30 Januari 2025

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Arif Mahmudin Zuhri

NIP 19700702 199603 1 001

# DAFTAR ISI

|   |    |
|---|----|
| <b>PENGANTAR</b> .....                            | 2  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                    | 5  |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....           | 9  |
| A. RENCANA STRATEGIS.....                         | 9  |
| B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 ..... | 14 |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....        | 18 |
| A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....                | 18 |
| B. REALISASI ANGGARAN.....                        | 34 |
| C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMER DAYA .....          | 35 |
| <b>BAB IV PENUTUP</b> .....                       | 36 |
| <b>LAMPIRAN</b> .....                             | 33 |

# BAB I PENDAHULUAN

---

Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi mulai beroperasi pada tahun 2007 beralamat di Jalan M. Husni Thamrin Kompleks Mall Kabuk Kota Jambi. Kemudian berubah struktur organisasi menjadi kantor Wilayah Modern sejak tanggal 09 September 2008 dan berpindah lokasi di Jalan Pemuda Nomor 49 Kota Padang. Pada tanggal 01 April 2015 KANTOR WILAYAH DJP Sumatera Barat dan Jambi beralamatkan di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 53, Padang, Sumatera Barat dan Jambi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak beserta perubahannya pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah memiliki tugas melaksanakan analisis, penjabaran, koordinasi, bimbingan, evaluasi, dan pengendalian kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang pajak dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Wilayah DJP menyelenggarakan fungsi:

- a. Analisis dan pelaksanaan penjabaran kebijakan, dan penyusunan rencana strategis di bidang perpajakan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan pemberian bimbingan di bidang perpajakan;
- c. Pelaksanaan koordinasi, pemberian bimbingan, analisis, dan penjabaran kebijakan pencapaian target penerimaan pajak;
- d. Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah;
- e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan, pelayanan, pengawasan, pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, penilaian, pengenaan, pemeriksaan, dan penagihan di bidang perpajakan;
- f. Pengelolaan administrasi dan pelaksanaan penilaian, pengenaan, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, forensik, dan intelijen di bidang perpajakan;
- g. Penyelesaian pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, dan/atau Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, dan pembatalan hasil pemeriksaan pajak;
- h. Pelaksanaan urusan gugatan dan banding;

- i. Pengelolaan data, arsip perpajakan dan non perpajakan;
- j. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama; dan
- k. Pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan di bidang kepegawaian, keuangan, tata usaha, sarana dan prasarana, dukungan teknis, advokasi, pengelolaan kinerja, dan kepatuhan internal.

Sedangkan struktur organisasi Kantor Wilayah DJP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak beserta perubahannya pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

a. Bagian Umum;

Terdiri atas:

- Subbagian Kepegawaian;
- Subbagian Keuangan;
- Subbagian Advokasi, Pelaporan, dan Kepatuhan Internal; dan
- Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;

b. Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan;

Terdiri atas:

- Seksi Data dan Potensi;
- Seksi Bimbingan Pengawasan; dan
- Seksi Dukungan Teknis Komputer;

c. Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian;

Terdiri atas:

- Seksi Bimbingan Pendaftaran;
- Seksi Bimbingan Ekstensifikasi; dan
- Seksi Bimbingan Pendataan, Penilaian, dan Pengenaan;

d. Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan;

Terdiri atas:

- Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan;
- Seksi Bimbingan Penagihan;
- Seksi Intelijen; dan
- Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan;

e. Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat;

Terdiri atas:

- Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen;

- Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi; dan
  - Seksi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
- f. Bidang Keberatan, Banding dan Pengurangan;
- Terdiri atas:
- Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan I;
  - Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan II;
  - Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan III; dan
  - Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan IV.

Dalam hal struktur organisasi, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak beserta perubahannya pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi terdiri dari Kantor Wilayah dan unit-unit vertikal sebagai berikut:

- a. 10 (sepuluh) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama;

Terdiri dari:

1. KPP Pratama Padang Satu;
2. KPP Pratama Padang Dua
3. KPP Pratama Bukittinggi;
4. KPP Pratama Solok;
5. KPP Pratama Payakumbuh;
6. KPP Pratama Jambi Telanaipura;
7. KPP Pratama Jambi Pelayangan;
8. KPP Pratama Muara Bungo;
9. KPP Pratama Bangko;
10. KPP Pratama Kuala Tungkal;

- b. 19 (sembilan belas) Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)

Terdiri dari:

1. KP2KP Pariaman;
2. KP2KP Tua Pejat
3. KP2KP Painan;
4. KP2KP Lubuk Basung;
5. KP2KP Lubuk Sikaping;
6. KP2KP Padang Panjang;
7. KP2KP Simpang Empat;

8. KP2KP Kotabaru;
9. KP2KP Muaro Sijunjung;
10. KP2KP Padang Aro;
11. KP2KP Sawahlunto;
12. KP2KP Batu Sangkar;
13. KP2KP Sengeti;
14. KP2KP Muara Bulian;
15. KP2KP Rimbo Bujang;
16. KP2KP Muara Tebo;
17. KP2KP Sungai Penuh;
18. KP2KP Sarolangun;
19. KP2KP Muara Sabak.

Dalam upaya mencapai target, Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi tidak hanya memiliki potensi yang menguntungkan, akan tetapi juga menghadapi berbagai permasalahan yang menjadi tantangan. Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Wilayah kerja yang luas mengharuskan setiap KPP Pratama melakukan *extra effort* baik dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan juga penagihan dengan jumlah pegawai yang terbatas;
2. Penambahan wajib pajak yang melonjak sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam pemenuhan kepatuhan wajib pajak;
3. Harga komoditas penentu penerimaan seperti kelapa sawit dan batubara tidak dapat diprediksi kedepannya;
4. Beberapa lokasi Wajib Pajak yang sulit dijangkau belum didukung sepenuhnya oleh sarana transportasi yang memadai, misal Kendaraan 4WD atau kapal motor;
5. Karakteristik Wajib Pajak di Provinsi Sumatera Barat lebih resisten dibandingkan dengan Provinsi Jambi, sehingga dalam membangun kesadaran Wajib Pajak tidak dapat hanya dengan mengandalkan sosialisasi atau cara persuasif, akan tetapi juga dengan melakukan penegakan hukum;
6. Minimnya ketersediaan tempat pembayaran pajak/bank persepsi di daerah tertentu;
7. Terdapat *remote area* yang tidak terjangkau oleh akses internet (*blank spot*);
8. Kepatuhan Wajib Pajak masih rendah serta masih terdapat Wajib Pajak yang dengan sengaja untuk tidak patuh dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan;
9. Jumlah *Account Representative* (AR) yang merupakan garda terdepan yang melaksanakan pengawasan terhadap Wajib Pajak belum ideal dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak yang diampu;
10. Wajib Pajak besar/strategis yang hanya berstatus cabang.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

---

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat. Rencana Strategis (Renstra) instansi Pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, kelemahan, peluang dan kendala yang timbul.

Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020–2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak ini merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, nilai, tujuan, sasaran strategi, program dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.

### A. Perencana Strategis

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, potensi, permasalahan, dan tantangan, memperhatikan Visi Pembangunan Nasional 2005–2025, visi dan misi Pemerintah 2020–2024, dan Misi Direktorat Jenderal Pajak 2020–2024, serta dalam rangka mendukung 9 (Sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita), maka Visi dan Misi Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi untuk tahun 2020–2024 adalah:

Visi: *“Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa Untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan; Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan.”*

- Misi:
1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
  2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
  3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi sebagaimana juga diamanatkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2023–2024 adalah:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2. Penerimaan pajak yang optimal; dan
3. Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020–2024 sebagai berikut:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif. Adapun strategi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk mewujudkan kondisi pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendukung strategi Kemenkeu Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Fiskal dan Sektor Keuangan Khususnya Kebijakan Relaksasi dan *Refocusing* Belanja untuk Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Dampak Covid-19, DJP menjabarkannya melalui strategi penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 2 tahun 2020, insentif fiskal dan penyesuaian prosedur pelayanan administrasi perpajakan berkaitan dengan Covid-19.
- b. Untuk mendukung strategi Kemenkeu Pemberian Insentif Fiskal dan Prosedural Guna Memulihkan Kinerja Perekonomian yang Terdampak Covid-19, DJP menjabarkannya melalui strategi:
  - 1) Penyusunan peraturan pelaksanaan UU No. 2 tahun 2020, insentif fiskal dan penyesuaian prosedur pelayanan administrasi perpajakan terkait Covid-19; dan
  - 2) Automasi pemberian fasilitas perpajakan.
- c. Untuk mendukung strategi Kemenkeu Penyempurnaan Dan Perbaikan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Fiskal dan Sektor Keuangan, DJP menjabarkannya melalui strategi:
  - 1) Penyusunan RUU di bidang Bea Meterai;
  - 2) Pembangunan sistem tata kelola regulasi perpajakan secara elektronik; dan
  - 3) Simplifikasi dan harmonisasi penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) dalam rangka akselerasi pencegahan sengketa *Transfer Pricing*.

## 2. Penerimaan Negara yang Optimal

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal. Strategi yang dilakukan DJP untuk mewujudkan kondisi penerimaan negara yang optimal adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendukung strategi Kemenkeu Perpanjangan Waktu Penyelesaian Administrasi Perpajakan untuk Memberikan Kemudahan dan Kepastian Hukum bagi Wajib Pajak dalam Pelaksanaan Hak dan/atau Pemenuhan Kewajibannya, DJP menjabarkannya melalui strategi Penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, insentif fiskal dan penyesuaian prosedur pelayanan administrasi perpajakan terkait Covid-19.
- b. Untuk mendukung strategi Kemenkeu Identifikasi Potensi dan Peningkatan Kepatuhan dan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), DJP menjabarkannya melalui strategi Peningkatan Kepatuhan Pajak Pelaku Usaha Ekonomi Digital.
- c. Untuk mendukung strategi Kemenkeu Pengembangan Layanan Pajak, Kepabeanan dan Cukai serta PNBP Berbasis Digital yang Terfokus pada *User Experience* dan *User Friendly*, DJP menjabarkannya melalui strategi:
  - 1) Pengembangan sistem *Click, Call, Counter*;
  - 2) Integrasi *Tax Knowledge Based* dan Situs Web DJP;
  - 3) Pengembangan Layanan Edukasi;
  - 4) Pengembangan Program Inklusi Perpajakan;
  - 5) Pengembangan edukasi melalui pihak ketiga;
  - 6) Pengembangan kapasitas dan sarana yang menunjang kehumasan yang efektif;
  - 7) Perluasan Prepopulated SPT PPh;
  - 8) Perluasan Kanal Pembayaran Pajak; dan
  - 9) Automasi Penelitian Restitusi WP Risiko Rendah.
- d. Untuk mendukung strategi Kemenkeu Penggalan Potensi Penerimaan Melalui Upaya Perluasan Basis Pajak, Kepabeanan dan Cukai, serta Pemetaan Potensi PNBP, DJP menjabarkannya melalui strategi:
  - 1) Pengaturan Kembali Basis Pemajakan Wajib Pajak Orang Pribadi;
  - 2) Pengawasan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Menengah;
  - 3) Penguatan dan perluasan basis Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan
  - 4) Optimalisasi fungsi Penilaian.
- e. Untuk mendukung strategi Kemenkeu Modernisasi Sistem Administrasi Pajak, Kepabeanan dan Cukai serta PNBP, DJP menjabarkannya melalui strategi Pembangunan Sistem Administrasi Perpajakan yang Terintegrasi.

- f. Untuk mendukung strategi Kemenkeu Penguatan Joint Program Penerimaan di lingkungan Kementerian Keuangan, DJP menjabarkannya melalui strategi Penguatan *Joint Program* untuk mendukung optimalisasi penerimaan pajak dan pelayanan kepada Wajib Pajak.
  - g. Untuk mendukung strategi Kemenkeu Peningkatan Kepatuhan Melalui Model Pengawasan Berbasis Segmentasi dan Teritorial, DJP menjabarkannya melalui strategi Tata Kelola Pengumpulan Data Lapangan.
  - h. Untuk mendukung strategi Kemenkeu Penguatan Pengawasan Perpajakan dan PNPB serta Pemberantasan Penyelundupan dan Barang-Barang Ilegal, DJP menjabarkannya melalui strategi:
    - 1) Kedalaman Audit yang Selektif dan Proses yang lebih Efisien;
    - 2) Pembangunan DJP *Digital Map*;
    - 3) Penegakan Hukum yang Utuh;
    - 4) Redefinisi Pelanggaran Pidana/Administrasi;
    - 5) Sarana dan infrastruktur *forensik digital*;
    - 6) Pengambilan Keputusan Penegakan Hukum Pidana Pajak yang Tersistemasi;
    - 7) Penyusunan ketentuan tentang pembiayaan kegiatan intelijen yang akuntabel;
    - 8) Penempatan petugas sebagai Perwakilan Direktorat Jenderal Pajak di luar negeri;
    - 9) Peningkatan Kepatuhan Pajak *High Wealth Individuals* dan Grup Usahanya;
    - 10) Pembangunan Basis Data Terintegrasi dan Modernisasi Sistem Pengawasan Instansi Pemerintah (Bendahara);
    - 11) Pembangunan basis data perizinan melalui perluasan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dalam mendorong kepatuhan pajak Wajib Pajak;
    - 12) Pembentukan Database Perpajakan Berdasarkan Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Pokok Wajib Pajak;
    - 13) Penyempurnaan Tata Kelola Data dan Informasi;
    - 14) Pembangunan data dan *environment*; dan
    - 15) Peningkatan kualitas pemanfaatan data dan informasi perpajakan.
3. Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif, dan Efisien
- Terdapat 3 kondisi yang ingin dicapai DJP untuk mencapai tujuan Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif, dan Efisien:
- a. Organisasi dan SDM yang optimal Strategi yang dilakukan DJP untuk mewujudkan kondisi Organisasi dan SDM yang optimal adalah:
    - 1) Untuk mendukung strategi Kemenkeu Pembangunan dan Pengembangan Manajemen Pengetahuan (knowledge management), DJP menjabarkannya melalui strategi Penyempurnaan Knowledge Management.

2) Pengelolaan organisasi yang efektif.

Terhadap strategi ini, DJP menjabarkannya melalui strategi:

- ◆ Penataan organisasi instansi vertikal;
- ◆ Penataan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP); dan
- ◆ Penataan jabatan fungsional.

3) Pengelolaan SDM yang efektif. Terhadap strategi ini, DJP menjabarkannya melalui strategi:

- ◆ Kebijakan pengamanan bagi petugas DJP;
- ◆ Perbaikan sistem manajemen karir;
- ◆ Penyusunan standar kompetensi jabatan;
- ◆ Implementasi *Individual Development Plan* (IDP);
- ◆ Penyesuaian peringkat jabatan dengan kompetensi;
- ◆ Pengukuran kinerja terintegrasi bagi seluruh pegawai DJP; dan
- ◆ Penyusunan peta pembelajaran (*Learning Journey*).

b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi Strategi yang dilakukan DJP untuk mewujudkan kondisi Sistem informasi yang andal dan terintegrasi adalah dengan melakukan Pengembangan Proyek Strategis TIK Kementerian Keuangan. Terhadap strategi ini, DJP menjabarkannya melalui strategi Pembangunan Sistem Administrasi Perpajakan yang Terintegrasi.

c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah Strategi yang dilakukan DJP untuk mewujudkan kondisi Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah adalah dengan Penguatan Tata Kelola Pengendalian Internal. Pedoman pelaksanaan rencana strategis DJP diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang tata kelola dan implementasi rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020 – 2024.

Dalam rangka melayani para pemangku kepentingan serta menjalankan tugasnya sebagai institusi penghimpun penerimaan pajak, terdapat berbagai potensi dan tantangan yang dihadapi oleh DJP. Potensi dan tantangan tersebut merupakan hal yang perlu dipertimbangkan dalam proses penyusunan rencana strategis.

## B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi tahun 2024 dan penjabarannya dalam bentuk inisiatif adalah sebagai berikut:

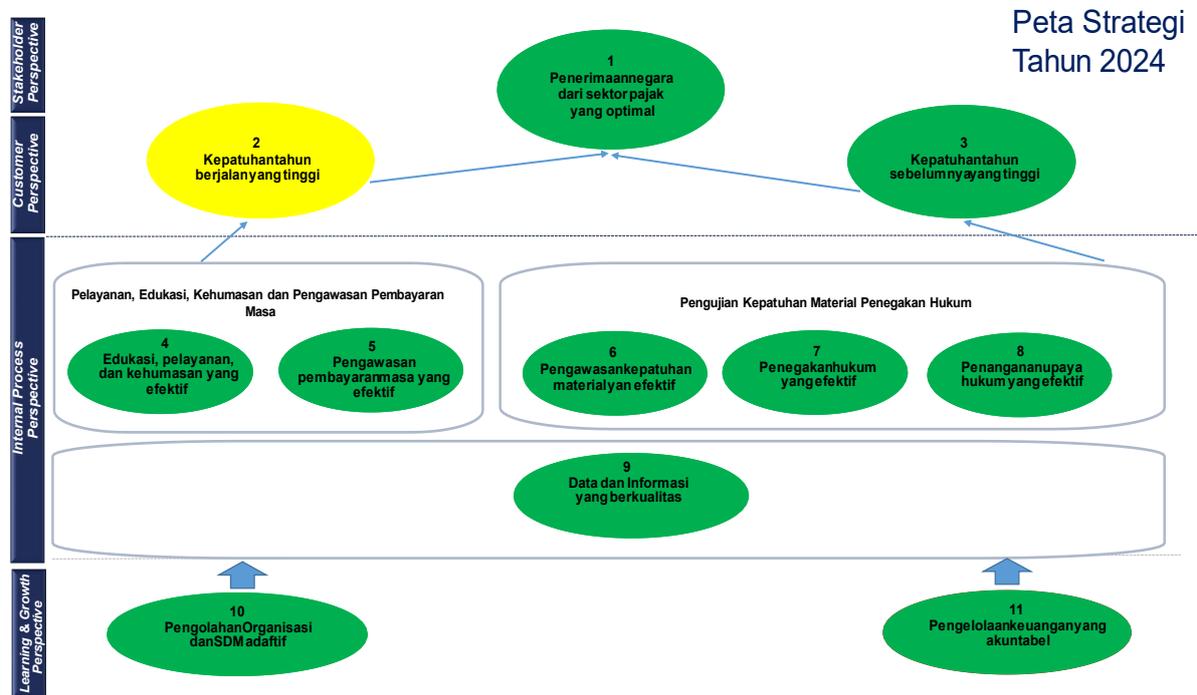
| No. | Sasaran Strategis                                | Inisiatif Strategis  | Unit in Charge |
|-----|--|--|----------------|
| 1   | Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal | (Berdasarkan teori <i>Balanced Scorecard</i> , Sasaran Strategis yang berada di <i>Stakeholder Perspective</i> , merupakan hasil ( <i>outcome</i> ) dari satu atau lebih inisiatif strategis yang dilakukan pada <i>Internal Process Perspective</i> dan <i>Learning and Growth Perspective</i> , sehingga tidak ada inisiatif strategis dan UICnya)   |                |
| 2   | Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi             | (Berdasarkan teori <i>Balanced Scorecard</i> , Sasaran Strategis yang berada di <i>Customer Perspective</i> , merupakan hasil ( <i>outcome</i> ) dari satu atau lebih inisiatif strategis yang dilakukan pada <i>Internal Process Perspective</i> dan <i>Learning and Growth Perspective</i> , sehingga tidak ada inisiatif strategis dan UICnya)  |                |
| 3   | Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi           | (Berdasarkan teori <i>Balanced Scorecard</i> , Sasaran Strategis yang berada di <i>Customer Perspective</i> , merupakan hasil ( <i>outcome</i> ) dari satu atau lebih inisiatif strategis yang dilakukan pada <i>Internal Process Perspective</i> dan <i>Learning and Growth Perspective</i> , sehingga tidak ada inisiatif strategis dan UICnya)  |                |
| 4   | Edukasi, Pelayanan, dan kehumasan yang efektif   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan koordinasi, monitoring, dan evaluasi dengan unit kerja vertikal agar meningkatkan kegiatan pelayanan, penyuluhan, dan kehumasan terhadap Wajib Pajak dan masyarakat;</li> <li>2. Meningkatkan kegiatan dan publikasi pelayanan, penyuluhan, dan kehumasan kepada Wajib Pajak dan masyarakat baik menggunakan media langsung maupun tidak</li> </ol> | Bidang P2Humas |

| No. | Sasaran Strategis                         | Inisiatif Strategis  | Unit in Charge            |
|-----|---|--|---------------------------|
|     |   | <p>langsung (media sosial, spanduk, banner, radio, dan koran);</p> <p>3. Meningkatkan koordinasi, monitoring, dan evaluasi dengan KPP agar segera menyelesaikan tindak lanjut pengaduan pelayanan perpajakan dalam waktu cepat;</p> <p>4. Bekerjasama dengan unit vertikal (KPP dan KP2KP) dalam melakukan kegiatan penyuluhan yang berkontribusi terhadap perubahan perilaku;</p> <p>5. Meningkatkan koordinasi, monitoring, dan evaluasi dengan unit kerja vertikal agar meningkatkan efektivitas kegiatan penyuluhan.</p> |                           |
| 5   | Pengawasan pembayaran masa yang efektif   | <p>1. Melakukan pemantauan rutin terkait dengan penerbitan STP;</p> <p>2. Melakukan pemantauan rutin terkait dengan Dinamisasi PPh Pasal 25;</p> <p>3. Melakukan pemantauan rutin tindak lanjut <i>Data Matching</i>.</p>  | Bidang DP3,<br>Bidang PEP |
| 6   | Pengujian kepatuhan material yang efektif | <p>1. Melakukan pemantauan rutin tindak lanjut SP2DK;</p> <p>2. Apresiasi kinerja AR terkait tindak lanjut SP2DK.</p>  | Bidang DP3,<br>Bidang PEP |
| 7   | Penegakan hukum yang efektif              | <p>1. Memperbanyak instruksi top-down ke KPP;</p> <p>2. Mengadakan bimbingan teknis pemeriksaan;</p>   | Bidang PPIP               |

| No. | Sasaran Strategis                           | Inisiatif Strategis  | Unit in Charge                                   |
|-----|---|--|--|
|     |   | 3. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, kepolisian, BINDA, rumah tahanan, dan rumah sakit untuk melakukan penyanderaan.<br>4. Penyidikan selektif dengan indikasi tindak pidana perpajakan yang kuat dengan alat bukti yang kuat;<br>5. Menjaga sinergi dengan Bidang KBP. |  |
| 8   | Penanganan Upaya Hukum yang efektif         | 1. Meningkatkan efisiensi penyelesaian keberatan;<br>2. Meningkatkan efektivitas penerapan SOP penyelesaian Keberatan dan Non Keberatan Pasal 36 ayat (1) b KUP;<br>3. Meningkatkan sosialisasi konsekuensi upaya hukum.   | Bidang KBP                                       |
| 9   | Data dan informasi yang berkualitas         | 1. Mendorong produksi data potensi perpajakan melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD);<br>2. Mendorong produksi hasil analisis data potensi perpajakan.   | Bidang DP3, Bidang PEP                           |
| 10  | Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif | 1. Melaksanakan Program Pengembangan Kapasitas, baik melalui metode tatap muka/ classroom (IHT, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, OJT, serta workshop atau konsinyering) dan melalui metode e-Learning;<br>2. Melakukan Pengusulan Diklat Pegawai;                          | Bagian Umum, Bidang DP3, Bidang PEP, Bidang PPIP |

| No. | Sasaran Strategis                   | Inisiatif Strategis   | Unit in Charge |
|-----|-------------------------------------|---|----------------|
|     |                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Melaksanakan program-program Kemenkeu Satu secara efektif dan kolaboratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</li> <li>4. Melakukan DKO sebelum pelaporan NKO, dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2023;</li> <li>5. Melakukan evaluasi pelaksanaan mitigasi risiko sebelum pelaporan NKO, dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2023;</li> <li>6. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan pembangunan ZI WBK/WBBM oleh unit kerja di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi.</li> </ol> |                |
| 11  | Pengelolaan keuangan yang akuntabel | Pembuatan rencana kerja perbidang dengan mencantumkan sampai detail anggaran.   | Bagian Umum    |

Perjanjian Kinerja Nomor: PK-23/PJ/2024 Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Tahun 2024 Peta Strategi Tahun 2024 sebagai berikut:



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi mengampu 11 (sebelas) sasaran strategis. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun 2024, setiap sasaran strategis diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai berikut:

| Kode SS/IKU                    | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama       | Target   | Realisasi | Pol arisasi | V/C | Bobot IKU | Bobot Tertimbang | Indeks Capaian |
|--------------------------------|--|----------|-----------|-------------|-----|-----------|------------------|----------------|
| <i>Stakeholder Perspective</i> |  |          |           |             |     |           | 30,00%           | 102,10         |
| 1                              | Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal |          |           |             |     |           |                  | 102,10         |
| 1a-CP                          | Persentase realisasi penerimaan pajak            | 100,00 % | 100,43%   | Max         | E/L | 26%       | 57,78%           | 100,43         |

|                                     |  |          |         |     |     |     |          |        |
|-------------------------------------|--|----------|---------|-----|-----|-----|----------|--------|
| 1b-N                                | Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas         | 100,00   | 104,38  | Max | P/L | 19% | 42,22%   | 104,38 |
| <i>Customer Perspective</i>         |  |          |         |     |     |     | 20,00%   | 100,00 |
| 2                                   | Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi   |          |         |     |     |     |          | 99,69  |
| 2a-CP                               | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)             | 100,00 % | 100,44% | Max | E/L | 26% | 57,78%   | 100,44 |
| 2b-CP                               | Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | 100,00 % | 98,67%  | Max | P/L | 19% | 42,22%   | 98,67  |
| 3                                   | Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi   |          |         |     |     |     |          | 100,30 |
| 3a-CP                               | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)           | 100,00 % | 100,30% | Max | E/M | 21% | 100,00 % | 100,30 |
| <i>Internal Process Perspective</i> |  |          |         |     |     |     | 25,00%   | 118,51 |
| 4                                   | Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif   |          |         |     |     |     |          | 114,49 |
| 4a-CP                               | Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan               | 74,00%   | 88,80%  | Max | E/M | 21% | 50,00%   | 120,00 |
| 4b-N                                | Indeks efektivitas penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan  | 100,00 % | 108,97% | Max | E/M | 21% | 50,00%   | 108,97 |
| 5                                   | Pengawasan pembayaran masa yang efektif  |          |         |     |     |     |          | 120,00 |
| 5a-CP                               | Persentase pengawasan pembayaran masa  | 90,00%   | 120,00% | Max | P/M | 14% | 100,00 % | 120,00 |
| 6                                   | Pengujian kepatuhan material yang efektif  |          |         |     |     |     |          | 118,65 |
| 6a-CP                               | Persentase penyelesaian  | 100,00 % | 120,00% | Max | P/M | 14% | 50,00%   | 120,00 |

|  |   |          |         |     |     |     |        |        |  |
|--|---|----------|---------|-----|-----|-----|--------|--------|--|
|  | permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan   |          |         |     |     |     |        |        |  |
| 6b-N                                     | Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu                             | 100,00 % | 117,29% | Max | P/M | 14% | 50,00% | 117,29 |  |
| 7  | Penegakan hukum yang efektif  |          |         |     |     |     |        | 119,88 |  |
| 7a-CP                                    | Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian   | 100,00 % | 119,72% | Max | P/M | 14% | 42,42% | 119,72 |  |
| 7b-CP                                    | Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi   | 90,00%   | 116,46% | Max | P/L | 19% | 57,58% | 120,00 |  |
| 8  | Penanganan Upaya Hukum yang efektif   |          |         |     |     |     |        | 118,06 |  |
| 8a-CP                                    | Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu   | 86,50%   | 99,60%  | Max | P/M | 14% | 40,00% | 115,14 |  |
| 8b-N                                     | Persentase penanganan upaya hukum yang efektif  | 63,00%   | 87,16%  | Max | E/M | 21% | 60,00% | 120,00 |  |
| 9  | Data dan Informasi yang berkualitas   |          |         |     |     |     |        | 120,00 |  |
| 9a-N                                     | Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan | 100,00 % | 120,00% | Max | P/M | 14% | 42,42% | 120,00 |  |
| 9b-N                                     | Persentase penghimpunan data regional dari ILAP   | 55,00%   | 88,38%  | Max | P/L | 19% | 57,58% | 120,00 |  |
| <i>Learning &amp; Growth Perspective</i> |   |          |         |     |     |     | 25,00% | 117,44 |  |
| 10                                       | Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif   |          |         |     |     |     |        | 114,88 |  |
| 10a-N                                    | Tingkat Kualitas Kompetensi SDM   | 90,00    | 113,26  | Max | P/M | 14% | 33,33% | 120,00 |  |
| 10b-N                                    | Indeks Penilaian Integritas Unit  | 100,00   | 117,71  | Max | P/M | 14% | 33,33% | 117,71 |  |
| 10c-N                                    | Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja   | 90,00    | 96,25   | Max | P/M | 14% | 33,33% | 106,94 |  |

|                                 |  |        |        |     |     |     |          |               |
|---------------------------------|--|--------|--------|-----|-----|-----|----------|---------------|
|                                 | dan Manajemen Risiko                         |        |        |     |     |     |          |               |
| 11                              | Pengelolaan keuangan yang akuntabel          |        |        |     |     |     |          | 120,00        |
| 11a-CP                          | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 100,00 | 120,00 | Max | P/M | 14% | 100,00 % | 120,00        |
| <b>Nilai Kinerja Organisasi</b> |  |        |        |     |     |     |          | <b>109,62</b> |

- Keterangan : Capaian belum divalidasi oleh kantor pusat

Rincian Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024 sebagai berikut:

| KODE IKU | NAMA IKU   | TARGET  |                    | REALISASI |                    | GAP    |
|----------|--|---------|--------------------|-----------|--------------------|--------|
|          |  | %       | Angka Multak       | %         | Angka Mutlak       |        |
| 1a-CP    | Persentase realisasi penerimaan pajak  | 100,00% | 13.454.628.438.000 | 100,43%   | 13.512.549.407.483 | 0,43%  |
|          |  |         | 13.454.628.438.000 |           | 13.454.628.438.000 |        |
| 1b-N     | Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas         | 100,00  |                    | 104,38    |                    | 4,38   |
|          |  |         |                    |           |                    |        |
| 2a-CP    | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)             | 100,00% | 12.456.567.923.000 | 100,44%   | 12.511.513.617.459 | 0,44%  |
|          |  |         | 12.456.567.923.000 |           | 12.456.567.923.000 |        |
| 2b-CP    | Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | 100,00% |                    | 98,67%    |                    | -1,33% |
|          |  |         |                    |           |                    |        |
| 3a-CP    | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)           | 100,00% | 998.060.515.000    | 100,30%   | 1.001.035.790.024  | 0,30%  |
|          |  |         | 998.060.515.000    |           | 998.060.515.000    |        |

|       |   |         |  |         |  |        |
|-------|---|---------|--|---------|--|--------|
| 4a-CP | Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan                      | 74,00%  |  | 88,80%  |  | 14,80% |
| 4b-N  | Indeks efektivitas penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan   | 100,00% |  | 108,97% |  | 8,97%  |
| 5a-CP | Persentase pengawasan pembayaran masa   | 90,00%  |  | 120,00% |  | 30,00% |
| 6a-CP | Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan                             | 100,00% |  | 120,00% |  | 20,00% |
| 6b-N  | Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu                             | 100,00% |  | 117,29% |  | 17,29% |
| 7a-CP | Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian   | 100,00% |  | 119,72% |  | 19,72% |
| 7b-CP | Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi   | 90,00%  |  | 116,46% |  | 26,46% |
| 8a-CP | Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu   | 86,50%  |  | 99,60%  |  | 13,10% |
| 8b-N  | Persentase penanganan upaya hukum yang efektif  | 63,00%  |  | 87,16%  |  | 24,16% |
| 9a-N  | Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan | 100,00% |  | 120,00% |  | 20,00% |
| 9b-N  | Persentase penghimpunan data regional dari ILAP   | 55,00%  |  | 88,38%  |  | 33,38% |
| 10a-N | Tingkat Kualitas Kompetensi SDM   | 90,00   |  | 113,26  |  | 23,26  |

|        |  |        |  |        |  |       |
|--------|--|--------|--|--------|--|-------|
| 10b-N  | Indeks Penilaian Integritas Unit                                       | 100,00 |  | 117,71 |  | 17,71 |
| 10c-N  | Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko | 90,00  |  | 96,25  |  | 6,25  |
| 11a-CP | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran                           | 100,00 |  | 120,00 |  |       |

a) Evaluasi Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024 di Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi sebagai berikut:

## 1. Penerimaan Negara dari Sektor Pajak Negara yang Optimal

a. 1a – CP : Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

Realisasi IKU Penerimaan Pajak Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi tahun 2024 adalah sebesar Rp. 13.512.549.407.483 atau tercapai 100,43 dari target sebesar Rp. 13.454.628.438.000. Realisasi penerimaan pajak sudah mencapai target namun belum mencapai nilai capaian maksimal (120).

### **1a-CP** Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (1a-CP) Persentase realisasi penerimaan pajak

KANWIL  
SUMBARJA

| T/R       | Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal |        |        |        |        |         |         | Pol/KP |
|-----------|--|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|
|           | (1a-CP) Persentase realisasi penerimaan pajak    |        |        |        |        |         |         |        |
|           | Q1   | Q2     | S1     | Q3     | s.d.Q3 | Q4      | Y       |        |
| Target    | 16.00%   | 47.00% | 47.00% | 70,00% | 70,00% | 100,00% | 100,00% |        |
| Realisasi | 17.30%   | 41.22% | 41.22% | 64.98  | 64.98  | 100.43  | 100.43  |        |
| Capaian   | 108,15   | 87.71  | 87.71  | 86.65  | 86.65  | 100.43  | 100.43  |        |

| No            | KPP                     | Target Penerimaan         | Realisasi Penerimaan      | Realisasi IKU  | Trajectory Q4  | Capaian Q4     |
|---------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1             | 201 - Padang Satu       | 2.859.450.853.000         | 2.862.118.927.639         | 100,09%        | 100,00%        | 100,09%        |
| 2             | 202 - Bukittinggi       | 837.939.420.000           | 839.611.744.702           | 100,20%        | 100,00%        | 100,20%        |
| 3             | 203 - Solok             | 767.485.458.000           | 769.653.108.510           | 100,28%        | 100,00%        | 100,28%        |
| 4             | 204 - Payakumbuh        | 312.218.155.000           | 316.738.327.230           | 101,45%        | 100,00%        | 101,45%        |
| 5             | 205 - Padang Dua        | 1.264.616.059.000         | 1.271.276.607.449         | 100,53%        | 100,00%        | 100,53%        |
| 6             | 331 - Jambi Telanaipura | 2.481.138.241.000         | 2.501.066.955.362         | 100,80%        | 100,00%        | 100,80%        |
| 7             | 332 - Muara Bungo       | 783.848.685.000           | 784.385.184.013           | 100,07%        | 100,00%        | 100,07%        |
| 8             | 333 - Bangko            | 1.008.470.757.000         | 1.015.462.692.206         | 100,69%        | 100,00%        | 100,69%        |
| 9             | 334 - Kuala Tungkal     | 853.944.870.000           | 857.309.175.378           | 100,39%        | 100,00%        | 100,39%        |
| 10            | 335 - Jambi Pelayangan  | 2.285.515.940.000         | 2.294.926.684.994         | 100,41%        | 100,00%        | 100,41%        |
| <b>Jumlah</b> |                         | <b>13.454.628.438.000</b> | <b>13.512.549.407.483</b> | <b>100,43%</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,43%</b> |

Sumber : Apportal, diakses tanggal 15 Januari 2024



6

b. 1b – N : Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Realisasi IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi tahun 2024 adalah sebesar 104.38 dari target 100 sehingga capaian IKU menjadi

104.38. Realisasi Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sudah mencapai target namun belum mencapai nilai capaian maksimal (120).

## 1b-N Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (1b-N) Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

KANWIL SUMBARJA

| 050 Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (1b-N) Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| T/R  | Q1     | Q2     | S1     | Q3     | s.d.Q3 | Q4     | Y      | Pol/KP |
| Target   | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |        |
| Realisasi  | 100,88 | 101,32 | 101,32 | 98,88  | 98,88  | 104,38 | 104,38 |        |
| Capaian  | 100,88 | 101,32 | 101,32 | 98,88  | 98,88  | 104,38 | 104,38 |        |

| Unit Kerja   | Bruto         | Deviasi        | Realisasi IKU | Target        | Capaian        |
|--|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 201 - PRATAMA PADANG SATU                                | 95,58%        | 90,00%         | 92,79         | 100,00        | 92,79%         |
| 202 - PRATAMA BUKITTINGGI                                | 91,95%        | 90,00%         | 90,98         | 100,00        | 90,98%         |
| 203 - PRATAMA SOLOK                                      | 98,64%        | 90,00%         | 94,32         | 100,00        | 94,32%         |
| 204 - PRATAMA PAYAKUMBUH                                 | 114,83%       | 100,00%        | 107,42        | 100,00        | 107,42%        |
| 205 - PRATAMA PADANG DUA                                 | 104,99%       | 100,00%        | 102,50        | 100,00        | 102,50%        |
| 331 - PRATAMA JAMBI TELANAIPURA                          | 104,35%       | 100,00%        | 102,18        | 100,00        | 102,18%        |
| 332 - PRATAMA MUARA BUNGO                                | 88,08%        | 90,00%         | 89,04         | 100,00        | 89,04%         |
| 333 - PRATAMA BANGKO                                     | 106,70%       | 100,00%        | 103,35        | 100,00        | 103,35%        |
| 334 - PRATAMA KUALA TUNGKAL                              | 95,55%        | 90,00%         | 92,78         | 100,00        | 92,78%         |
| 335 - PRATAMA JAMBI PELAYANGAN                           | 96,53%        | 80,00%         | 88,27         | 100,00        | 88,27%         |
| <b>050 - KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI</b> | <b>98,75%</b> | <b>110,00%</b> | <b>104,38</b> | <b>100,00</b> | <b>104,38%</b> |



Sumber : Aplikasi Mandor DJP, diakses tanggal 15 Januari 2024

## 2. Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi

### a. 2a - CP: Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi tahun 2024 adalah 100.44%, dari target sebesar 100%, sehingga capaian menjadi 100.44. Realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sudah mencapai target namun belum mencapai nilai capaian maksimal (120).

## 2a-CP Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (2a-CP) Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

KANWIL SUMBARJA

| 050 Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (2a-CP) Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) |        |        |        |        |        |         |         |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| T/R   | Q1     | Q2     | S1     | Q3     | s.d.Q3 | Q4      | Y       |
| Target  | 16,00% | 47,00% | 47,00% | 70,00% | 70,00% | 100,00% | 100,00% |
| Realisasi   | 17,34% | 41,04% | 41,04% | 66,97% | 66,97% | 100,44% | 100,44% |
| Capaian   | 108,34 | 87,32  | 87,32  | 89,29  | 89,29  | 100,44% | 100,44% |

| Unit Kerja                                     | Target PPM                | Realisasi PPM             | % Realisasi    | % trajectory   | % Capaian      |
|--|---------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 201 KPP Pratama Padang Satu                    | 2.689.367.899.000         | 2.691.488.116.733         | 100,08%        | 100,00%        | 100,08%        |
| 202 KPP Pratama Bukittinggi                    | 785.139.616.000           | 786.638.058.493           | 100,19%        | 100,00%        | 100,19%        |
| 203 KPP Pratama Solok                          | 723.514.624.000           | 725.589.505.896           | 100,29%        | 100,00%        | 100,29%        |
| 204 KPP Pratama Payakumbuh                     | 287.394.084.000           | 291.851.607.547           | 101,55%        | 100,00%        | 101,55%        |
| 205 KPP Pratama Padang Dua                     | 1.152.840.826.000         | 1.159.809.259.778         | 100,60%        | 100,00%        | 100,60%        |
| 331 KPP Pratama Jambi Telanaipura              | 2.247.959.968.000         | 2.267.227.600.810         | 100,86%        | 100,00%        | 100,86%        |
| 332 KPP Pratama Muara Bungo                    | 714.391.385.000           | 714.183.337.926           | 99,97%         | 100,00%        | 99,97%         |
| 333 KPP Pratama Bangko                         | 900.469.744.000           | 906.927.242.403           | 100,72%        | 100,00%        | 100,72%        |
| 334 KPP Pratama Kuala Tungkal                  | 819.456.329.000           | 822.709.797.047           | 100,40%        | 100,00%        | 100,40%        |
| 335 KPP Pratama Jambi Pelayangan               | 2.136.033.448.000         | 2.145.089.090.826         | 100,42%        | 100,00%        | 100,42%        |
| <b>050 Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi</b> | <b>12.456.567.923.000</b> | <b>12.511.513.617.459</b> | <b>100,44%</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,44%</b> |

Sumber : Aplikasi Mandor-DJP, diakses tanggal 15 Januari 2024



10

b. 2b - CP: Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Realisasi IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi tahun 2024 adalah 98,67%, dari target sebesar 100%, sehingga capaian menjadi 96,67. Realisasi persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak mencapai target karena melonjaknya wajib pajak wajib SPT yang tidak terantisipasi dengan optimal sehingga pencapaian IKU ini belum terealisasi secara maksimal.

**2b-CP** **Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi**  
(2b-CP) Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

KANWIL SUMBARJA

| 050 Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi   |        |        |        |         |         |         |         |
|--|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| (2b-CP) Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi |        |        |        |         |         |         |         |
| T/R  | Q1     | Q2     | S1     | Q3      | s.d.Q3  | Q4      | Y       |
| Target   | 60,00% | 80,00% | 80,00% | 90,00%  | 90,00%  | 100,00% | 100,00% |
| Realisasi  | 75,85% | 86,92% | 86,92% | 92,33%  | 92,33%  | 98,67%  | 98,67%  |
| Capaian  | 120    | 108,66 | 108,66 | 102,59% | 102,59% | 98,67%  | 98,67%  |

| Unit Kerja                                 | Wajib SPT         | Target SPT        | WP Wajib SPT Tepat Waktu | Total SPT Masuk   | Realisasi IKU  | Trajektori     |
|--|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| KPP Pratama Padang Satu                    | 120,681           | 101,468           | 54,046                   | 68,790            | 78,45%         | 100,00%        |
| KPP Pratama Bukittinggi                    | 115,592           | 95,528            | 53,794                   | 83,857            | 99,05%         | 100,00%        |
| KPP Pratama Solok                          | 83,261            | 68,948            | 41,951                   | 61,387            | 101,20%        | 100,00%        |
| KPP Pratama Payakumbuh                     | 64,925            | 54,604            | 33,092                   | 50,140            | 103,95%        | 100,00%        |
| KPP Pratama Padang Dua                     | 80,151            | 67,280            | 37,525                   | 59,603            | 99,77%         | 100,00%        |
| KPP Pratama Jambi Telanaipura              | 81,662            | 67,115            | 30,981                   | 61,744            | 101,23%        | 100,00%        |
| KPP Pratama Muara Bungo                    | 59,414            | 49,312            | 31,981                   | 43,354            | 100,89%        | 100,00%        |
| KPP Pratama Bangko                         | 71,381            | 58,689            | 29,464                   | 59,287            | 111,06%        | 100,00%        |
| KPP Pratama Kuala Tungkal                  | 30,045            | 25,236            | 15,023                   | 24,785            | 110,12%        | 100,00%        |
| KPP Pratama Jambi Pelayangan               | 53,011            | 43,648            | 25,011                   | 39,872            | 102,81%        | 100,00%        |
| <b>Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi</b> | <b>760,123</b>    | <b>631,808</b>    | <b>352,868</b>           | <b>552,819</b>    | <b>98,67%</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>Nasional</b>                            | <b>19,273,423</b> | <b>16,038,809</b> | <b>9,913,903</b>         | <b>15,423,040</b> | <b>108,52%</b> | <b>100,00%</b> |



**3. Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi**

3a - CP : Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)

Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi tahun 2024 adalah 100.30% dari target sebesar 100%, dari target sebesar 100%, sehingga capaian menjadi 100.30. Realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) sudah mencapai target namun belum mencapai nilai capaian maksimal (120).



## Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (3a-CP) Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Peng ujian Kepatuhan Material (PKM)

KANWIL  
SUMBARJA

| 050       |        | Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi<br>(3a-CP) Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) |        |        |        |         |         |        |
|-----------|--------|---|--------|--------|--------|---------|---------|--------|
| T/R       | Q1     | Q2  | S1     | Q3     | s.d.Q3 | Q4      | Y       | Pol/KP |
| Target    | 25,00% | 50,00%  | 50,00% | 75,00% | 75,00% | 100,00% | 100,00% |        |
| Realisasi | 20,38% | 43,69%  | 43,69% | 46,51% | 46,51% | 100,30% | 100,30% |        |
| Capaian   | 81,52  | 87,38   | 87,38  | 62,02  | 62,02  | 100,30% | 100,30% |        |

| Unit Kerja                              | Target PKM      | Realisasi PKM     | % Realisasi | % trajectory | % Capaian |
|---|-----------------|-------------------|-------------|--------------|-----------|
| 201 KPP Pratama Padang Satu             | 170.082.954.000 | 170.630.810.906   | 100,32%     | 100,00%      | 100,32%   |
| 202 KPP Pratama Bukittinggi             | 52.799.804.000  | 52.973.686.209    | 100,33%     | 100,00%      | 100,33%   |
| 203 KPP Pratama Solok                   | 43.970.834.000  | 44.063.602.614    | 100,21%     | 100,00%      | 100,21%   |
| 204 KPP Pratama Payakumbuh              | 24.824.071.000  | 24.886.719.683    | 100,25%     | 100,00%      | 100,25%   |
| 205 KPP Pratama Padang Dua              | 111.775.233.000 | 111.467.347.671   | 99,72%      | 100,00%      | 99,72%    |
| 331 KPP Pratama Jambi Telanaipura       | 233.178.273.000 | 233.839.354.552   | 100,28%     | 100,00%      | 100,28%   |
| 332 KPP Pratama Muara Bungo             | 69.457.300.000  | 70.201.846.087    | 101,07%     | 100,00%      | 101,07%   |
| 333 KPP Pratama Bangko                  | 108.001.013.000 | 108.535.449.803   | 100,49%     | 100,00%      | 100,49%   |
| 334 KPP Pratama Kuala Tungkal           | 34.488.541.000  | 34.599.378.331    | 100,32%     | 100,00%      | 100,32%   |
| 335 KPP Pratama Jambi Pelayangan        | 149.482.492.000 | 149.837.594.168   | 100,24%     | 100,00%      | 100,24%   |
| 050 Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi | 998.060.515.000 | 1.001.035.790.024 | 100,30%     | 100,00%      | 100,30%   |

Sumber : Aplikasi Mandor-DJP, diakses tanggal 13 Januari 2024



12

### 4. Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif

- a. 4a - CP : Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi tahun 2024 adalah 88,80%, dari target yang ditetapkan sebesar 74%, sehingga capaian menjadi 120. Pencapaian tersebut sudah optimal karena telah mencapai realisasi maksimal berdasarkan rumus perhitungan.



## Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (4a-CP) Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

KANWIL  
SUMBARJA

Data Unit Kerja

| Kode Unit | Nama Unit                                   | Realisasi |               |                    |                |               |              | Progres      |              |              |          |          |
|-----------|---|-----------|---------------|--------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|
|           |   | Kegiatan  |               | Perubahan Perilaku |                | Realisasi IKU | Capaian IKU  |              |              |              |          |          |
|           |   | Capaian   | Rasio (18,8%) | Capaian            | Rasio (26,12%) |               | s.d Q1 (18%) | s.d Q2 (46%) | s.d Q3 (69%) | s.d Q4 (74%) |          |          |
| 050       | KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI | 100,00 %  | 18,50 %       | 120,00 %           | 28,12 %        | 102,81 %      | 42,18 %      | 88,80 %      | 120,00 %     | 120,00 %     | 120,00 % | 120,00 % |
| 201       | PRATAMA PADANG SATU                         | 100,00 %  | 18,50 %       | 120,00 %           | 28,12 %        | 120,00 %      | 42,18 %      | 88,80 %      | 120,00 %     | 120,00 %     | 120,00 % | 120,00 % |
| 202       | PRATAMA BUKITTINGGI                         | 100,00 %  | 18,50 %       | 120,00 %           | 28,12 %        | 120,00 %      | 42,18 %      | 88,80 %      | 120,00 %     | 120,00 %     | 120,00 % | 120,00 % |
| 203       | PRATAMA SOLOK                               | 100,00 %  | 18,50 %       | 120,00 %           | 28,12 %        | 120,00 %      | 42,18 %      | 88,80 %      | 120,00 %     | 120,00 %     | 120,00 % | 120,00 % |
| 204       | PRATAMA PAYAKUMBUH                          | 100,00 %  | 18,50 %       | 110,64 %           | 28,12 %        | 83,51 %       | 42,18 %      | 88,80 %      | 120,00 %     | 120,00 %     | 120,00 % | 120,00 % |
| 205       | PRATAMA PADANG DUA                          | 100,00 %  | 18,50 %       | 120,00 %           | 28,12 %        | 120,00 %      | 42,18 %      | 88,80 %      | 120,00 %     | 120,00 %     | 120,00 % | 120,00 % |
| 331       | PRATAMA JAMBI TELANAIPURA                   | 100,00 %  | 18,50 %       | 120,00 %           | 28,12 %        | 70,21 %       | 42,18 %      | 88,80 %      | 120,00 %     | 120,00 %     | 120,00 % | 120,00 % |
| 332       | PRATAMA MUARA BUNGO                         | 100,00 %  | 18,50 %       | 120,00 %           | 28,12 %        | 58,65 %       | 42,18 %      | 88,80 %      | 120,00 %     | 120,00 %     | 120,00 % | 120,00 % |
| 333       | PRATAMA BANGKO                              | 100,00 %  | 18,50 %       | 120,00 %           | 28,12 %        | 52,63 %       | 42,18 %      | 88,80 %      | 120,00 %     | 120,00 %     | 120,00 % | 120,00 % |
| 334       | PRATAMA KUALA TUNGKAL                       | 100,00 %  | 18,50 %       | 85,32 %            | 28,12 %        | 84,89 %       | 42,18 %      | 88,80 %      | 120,00 %     | 120,00 %     | 120,00 % | 120,00 % |
| 335       | PRATAMA JAMBI PELAYANGAN                    | 100,00 %  | 18,50 %       | 83,09 %            | 28,12 %        | 55,51 %       | 42,18 %      | 88,80 %      | 120,00 %     | 120,00 %     | 120,00 % | 120,00 % |
| 411300001 | Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi         | 100,00 %  | 18,50 %       | 120,00 %           | 28,12 %        | 120,00 %      | 42,18 %      | 88,80 %      | 88,80 %      | 120,00 %     | 120,00 % | 120,00 % |

| Realisasi IKU | Target Triwulan IV | Capaian IKU |
|---------------|--------------------|-------------|
| 88,80%        | 74%                | 120         |

13

- b. 4b - N : Indeks efektivitas penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan

Realisasi IKU Indeks efektivitas penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi pada tahun 2024 telah mencapai 108.97% dari target 100, sehingga capaian menjadi 108.97. Nilai ini didapatkan dari hasil survei yang dilakukan terhadap wajib pajak selaku pemangku kepentingan. Realisasi Indeks efektivitas penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan sudah mencapai target namun belum mencapai nilai capaian maksimal (120).

## **5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif**

- 5a – CP : Persentase pengawasan pembayaran masa

Realisasi IKU Persentase pengawasan pembayaran masa Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi tahun 2024 adalah 120% dari target sebesar 90%, sehingga capaian menjadi 120. Pencapaian tersebut sudah optimal karena telah mencapai realisasi maksimal berdasarkan rumus perhitungan.

## **6. Pengujian kepatuhan material yang efektif**

- 6a – CP : Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

Realisasi IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi tahun 2024 adalah 120% dari target sebesar 100%, sehingga capaian menjadi 120. Pencapaian tersebut sudah optimal karena telah mencapai realisasi maksimal berdasarkan rumus perhitungan.

## **7. Penegakan hukum yang efektif**

- a. 7a - CP : Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi tahun 2024 adalah 119.72% dari target sebesar 100%, sehingga capaian menjadi 119.72. Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian sudah mencapai target namun belum mencapai nilai capaian maksimal (120).

- b. 7b - N : Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi

Realisasi IKU Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi tahun 2024 adalah 116.46% dari target sebesar 90%, sehingga capaian menjadi 120. Pencapaian tersebut sudah optimal karena telah mencapai realisasi maksimal berdasarkan rumus perhitungan.

## **8. Penanganan Upaya Hukum yang efektif**

- a. 8a - CP : Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu

Realisasi IKU Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi pada tahun 2024 ini adalah 99.60% dari target sebesar 86.50%, sehingga capaian menjadi 115.14 Realisasi IKU Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu sudah mencapai target namun belum mencapai nilai capaian maksimal (120).

- b. 8b - N : Persentase penanganan upaya hukum yang efektif

Realisasi IKU Persentase Persentase penanganan upaya hukum yang efektif Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi pada tahun 2024 ini adalah 87.16% dari target sebesar 63%, sehingga capaian menjadi 120. Pencapaian tersebut sudah optimal karena telah mencapai realisasi maksimal berdasarkan rumus perhitungan.

## **9. Data dan Informasi yang berkualitas**

- a. 9a - N : Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan

Realisasi IKU Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi pada tahun 2024 ini adalah 120% dari target sebesar 100%, sehingga capaian menjadi 120. Pencapaian tersebut sudah optimal karena telah mencapai realisasi maksimal berdasarkan rumus perhitungan.

- b. 9b - N : Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

Realisasi IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi pada tahun 2024 ini adalah 88.38% dari target sebesar 55%, sehingga capaian menjadi 120. Pencapaian tersebut sudah optimal karena telah mencapai realisasi maksimal berdasarkan rumus perhitungan.

## **10. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif**

- a. 10a-N : Tingkat Kualitas Kompetensi SDM

Realisasi Tingkat Kualitas Kompetensi SDM Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi pada tahun 2024 ini adalah 113.26 dari target sebesar 90.00, sehingga capaian menjadi 120. Pencapaian tersebut sudah optimal karena telah mencapai realisasi maksimal berdasarkan rumus perhitungan.

- b. 10b-N : Indeks Penilaian Integritas Unit

Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi pada tahun 2024 ini adalah 117.71 dari target sebesar 100, sehingga capaian menjadi 117.71. Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit sudah mencapai target namun belum mencapai nilai capaian maksimal (120).

- c. 10c-N : Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko  
Realisasi IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi pada tahun 2024 ini adalah 96.25 dari target sebesar 90.00, sehingga capaian menjadi 106.94  
Realisasi IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko sudah mencapai target namun belum mencapai nilai capaian maksimal (120).

## **11. Pengelolaan Keuangan yang akuntabel**

11a - CP : Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Realisasi IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi Tahun 2024 sebesar 120 dari target sebesar 100 sehingga capaian menjadi 120. Pencapaian tersebut sudah optimal karena telah mencapai realisasi maksimal berdasarkan rumus perhitungan.

b) Tindakan yang telah dilaksanakan di Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi Tahun 2024

- Mengirimkan Nota Dinas hal Imbauan Pelaksanaan Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 nomor ND-484/WPJ.27/2024 tanggal 05-03-2024;
- Mengirimkan Nota Dinas hal Himbauan dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPH OP di Lingkungan Pemerintah Daerah di Wilayah Sumatera Barat nomor ND-536/WPJ.27/2024 tanggal 08-03-2024;
- ND-484/WPJ.27/2024 05-03-2024 Imbauan Pelaksanaan Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan Tahun Pajak 2023;
- Membuka kelas pajak Pelaporan SPT Tahunan setiap hari Rabu;
- Melaksanakan aksi simpatik di Car Free Day Kota Padang;
- Melaksanakan Talkshow dengan tema Pelaporan SPT Tahunan dan Peadanan NIK sebagai NPWP pada Radio RRI Pro 1 Padang;
- Monitoring dan Evaluasi Penerimaan SPT Tahunan;
- Sosialisasi Pelaporan SPT Tahunan bagi Dosen di lingkungan Universitas Andalas;
- Melakukan koordinasi dengan KPP melalui Focus Group Discussion di Forum P2Humas;
- Mengirimkan Nota Dinas Tindak Lanjut atas Wajib Pajak yang Menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan;
- Mengirimkan Nota Dinas Upaya Peningkatan Kepatuhan SPT Tahunan PPh (ND-1558/WPJ.27/2024 tanggal 23 Juli 2024) untuk kemudian dapat Wajib Pajak tindak lanjuti dengan mengirimkan Nota Dinas pengawasan per AR;
- Mengirimkan 10.000 data Wajib Pajak untuk kemudian dilaksanakan Voice blast oleh KLIP DJP pada bulan Februari dan 10.000 data Wajib Pajak pada bulan Juni;

- Mengadakan Rapat Kerja Pemeriksaan tentang strategi pemeriksaan Tahun 2024;
- Menerima, membahas dan telah mengirimkan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan ke Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan;
- Melakukan reviu atas konsep LHP dan KKP sebelum dilakukan pembahasan akhir;
- Melakukan pembahasan atas permintaan Quality Assurance dari Wajib Pajak;
- Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi setiap bulan terhadap kegiatan Pemeriksaan di Lingkungan Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi;
- Melakukan desentralisasi peningkatan kapasitas SDM Fungsional Pemeriksa Pajak;
- Melakukan Monitoring SKP, LHP Konversi dan Pencairan Setiap Minggu;
- Mengadakan IHT Peningkatan Kompetensi SDM FPP;
- Melakukan Permintaan DSPP ke KPP dan Pembahasan DSPP yang akan dikirimkan ke Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan;
- Mengirimkan Surat Permintaan Data kepada 32 Instansi Pemerintah Daerah di Sumatera Barat dan Jambi
- Pendekatan ke pemda (dinas terkait) dengan melakukan kunjungan untuk menindaklanjuti Surat Permintaan Data
- Telah dilakukan rekapitulasi atas jawaban Pemerintah Daerah sebagai Tindaklanjut Surat Permintaan Data yang telah dikirimkan;
- Untuk data yang tidak tersedia di Pemda telah dimintakan Surat Konfirmasi Ketersediaan Data;
- Revisi Target Angka Mutlak IKU Penghimpunan Data Regional dari ILAP Kemenkeu-Two sampai dengan Kemenkeu-Four di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi;
- Bimtek Penghimpunan data regional, pengenalan portal data pihak ke tiga bersama Direktorat DIP yang diikuti oleh Pemda, KPP, dan KP2KP di Provinsi Jambi;
- Membentuk Focus Group Discussion dengan para pemilik data di masing-masing Instansi;
- Melakukan Bimbingan Teknis Penghimpunan Data Regional dari ILAP dan Penyusunan Daftar Sasaran Pengawasan Bersama (DSPB) Tahun 2024 (17 September 2024);
- Mengirimkan Nota Dinas terkait Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan per Triwulan Tahun 2024;

- Mengirimkan Nota Dinas terkait Penegasan Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan per Triwulan Tahun 2024;
- Melakukan monitoring pengisian survei yang dilakukan unit kerja;
- Mengirimkan longlist responden sebanyak 3,012 Wajib Pajak;
- Berkoordinasi dengan KPP terkait capaian jumlah responden survei baik yang dilaksanakan secara mandiri/ pihak ketiga (PT Encienty);
- Membuat laporan hasil survei kepuasan masyarakat secara triwulanan beserta rekomendasinya;
- Menerbitkan Monitoring Mingguan Capaian kinerja IKU Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang disampaikan kepada KPP setiap awal Minggu kerja;
- Telah dilakukan kegiatan rakorda di Lingkungan Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi di bulan Februari dan Agustus 2024;
- Telah dilakukan kegiatan Monev ke KPP di bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus 2024;
- Telah terbit 1 Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan an Bujang di 3 Januari 2024;
- Telah diterima lengkap Berkas Perkara Wajib Pajak (P21) an AH Pada Bulan Februari 2024;
- Telah dilaksanakan penyerahan tanggung jawab tersangka AH bulan Februari 2024;
- Telah dilakukan Penyitaan atas 2 tanah terangka AH senilai Rp1.001.635.900 dan Rp763.982.000;
- Telah terbit 1 Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan an Didik Hermanto pada 21 Maret 2024;
- Telah terbit 1 Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan an PT CPE pada 15 Juni 2024;
- Telah dilaksanakan Usulan Penghapusan Piutang Pajak Semester 1;
- Telah dilaksanakan perpanjangan pencegahan sebanyak 4 wajib pajak;
- Melaksanakan Program Pengembangan Kapasitas melalui metode tatap muka (In-House Training) dan E-Learning;
- Menyiapkan dan menyediakan bahan bagi peserta uji kompetensi teknis dan sarana dan prasana bagi peserta online assessment;
- Melaksanakan IHT/ Sosialisasi Budaya Organisasi Kemenkeu Triwulan I;
- Menyampaikan daftar program open course yang diselenggarakan pusdiklat di lingkungan kementerian keuangan sebagai acuan dalam memenuhi target jamlat tatap muka pegawai;

- Menyampaikan longlist responden SPIU tepat waktu pada tanggal 30 September 2024;
- Melaksanakan penilaian ZI WBK pada aplikasi DIA untuk KPP Pratama Kuala Tungkal;
- Melakukan konsultasi dan diskusi bersama dengan KPPN Padang;
- Merencanakan kebutuhan anggaran sebaik mungkin sehingga Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan dapat terjaga dan mengawasi penyerapan anggaran setiap bulannya;
- Menjaga seluruh pelaksanaan kegiatan dan penganggarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Melakukan monitoring dan evaluasi IKPA satker Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi;
- Koordinasi dengan bidang-bidang dalam penyusunan RPD dan rencana kegiatan;
- Melakukan sharing session melalui zoom dengan seluruh KPP lingkup Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi, dan membahas kinerja pelaksanaan anggaran.

c) Akar masalah

- Terdapat gap kompetensi yang perlu dilakukan pengembangan dan pembekalan khususnya dalam mempersiapkan pegawai mengikuti Assessment Center dan Uji Kompetensi Teknis, serta dalam rangka meningkatkan kinerja dan kompetensi selama bekerja;
- Ability to Pay (ATP) Wajib Pajak/Penanggung Pajak sebagian besar adalah Low bahkan Very Low;
- Tindakan Penagihan yang belum optimal yang disebabkan oleh berbagai kendala antara lain:
  - Banyaknya kahir dengan nilai yang tidak signifikan namun harus ditindaklanjuti;
  - Alamat WP/PP tidak lengkap;
  - WP/PP tidak ditemukan;
  - Tidak seluruh WP/PP mempunyai saldo di rekening yang bisa dieksekusi.
- Kurangnya bahan baku Pemeriksaan Bukti Permulaan untuk ditingkatkan ke Penyidikan;
- Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Penyidikan sebagian besar berada di wilayah Jambi;
- Wajib Pajak tidak menghadiri panggilan dan tidak memiliki kemampuan bayar;
- Wajib Pajak tidak menggunakan perangkat digital dan/atau telah menghilangkan perangkat digital yang dimiliki;

- Tersebar data di beberapa Badan/Dinas pemilik data sehingga perlu dilakukan pendekatan ke masing-masing Badan/Dinas;
- Permintaan Data melalui persuratan belum optimal, perlu dilakukan kunjungan langsung ke Badan/Dinas pemilik data atau pendekatan personal;
- Terdapat pemda yang belum menjawab Surat Konfirmasi Ketersediaan Data sehingga belum dapat dilakukan penyesuaian terhadap target data ILAP yang wajib dikumpulkan karena beragamnya birokrasi terkait dengan pertukaran data di beberapa pemda;
- Wajib Pajak tidak dapat dihubungi dan/atau menolak menjadi responden survei;
- Terdapat perbedaan solusi yang disampaikan oleh Petugas Pajak kepada Wajib Pajak;
- Wajib Pajak tidak mengetahui kewajiban perpajakannya;
- Wajib Pajak merasa kesulitan dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan;
- Pajak belum menjadi kesadaran Masyarakat;
- Kurangnya kesadaran pemerintah daerah terkait pemberian data;
- Kendala birokrasi yang mengharuskan permintaan data melalui pimpinan atau gubernur;
- Tidak ada konsekuensi jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban menyerahkan data;
- Ketersediaan data sebagai bahan LHA terbatas;
- Account Representative belum menindaklanjuti LHA yang sudah diturunkan oleh Kanwil;
- Terdapat data pemicu masih dianggap kurang valid, mentah, dan/atau tidak dapat digunakan;
- SP2DK yang diterbitkan kurang berkualitas;
- Kurangnya pengawasan penyelesaian SP2DK;
- Kurangnya pemahaman atas data Wajib Pajak;
- WP tidak memiliki kemauan untuk melakukan pembayaran sesuai SP2DK yang diterbitkan;
- Kurangnya Optimalisasi kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dari Tindak lanjut Data Perpajakan;

## B. Realisasi Anggaran

Program/Kegiatan Anggaran Tahun 2024 Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi sebagai berikut:

|   |                          |
|---|--------------------------|
| A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara  | Rp. 2.854.628.000        |
| 1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara       | Rp. 457.485.000          |
| 2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi     | Rp. 925.024.000          |
| 3. Pengawasan dan Penegakan Hukum         | Rp. 829.098.000          |
| 4. Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan   | Rp. 152.987.000          |
| 5. Pengawasan dan Penegakan Hukum         | Rp. 490.034.000          |
| B. Program Dukungan Manajemen             | Rp. 6.288.690.000        |
| 1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum    | Rp. 4.987.569.000        |
| 2. Pengelolaan Organisasi dan SDM         | Rp. 1.301.121.000        |
| <b>Total Program/ Kegiatan Tahun 2024</b> | <b>Rp. 9.143.318.000</b> |

| Jenis belanja   | Pagu (Rp)            | Blokir (Rp)       | Pagu Netto (Rp)      | Proporsi Pagu (%) |
|-----------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Belanja Pegawai | 1.001.705.000        | -                 | 1.001.705.000        | 10,96             |
| Belanja Barang  | 8.006.345.000        | 49.732.000        | 7.956.613.000        | 87,02             |
| Belanja Modal   | 185.268.000          | -                 | 185.268.000          | 2,03              |
| <b>TOTAL</b>    | <b>9.193.318.000</b> | <b>49.732.000</b> | <b>9.143.586.000</b> | <b>100,00</b>     |

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa Pagu Anggaran Netto Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi didominasi oleh Belanja Barang yaitu sebesar Rp7.956.613.000 atau sebesar 87,02% dari total pagu anggaran keseluruhan. Atas pagu anggaran netto Belanja Barang tersebut telah dilakukan blokir sebesar Rp49.732.000 dalam rangka penghematan anggaran belanja perjalanan dinas sehubungan dengan arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024.

Berdasarkan monitoring Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN), total penyerapan anggaran belanja Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi s.d. tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar 96,67% dengan rincian sebagai berikut:

| Jenis belanja   | Pagu (Rp)     | Realisasi     |       | Sisa        |      |
|-----------------|---------------|---------------|-------|-------------|------|
|                 |               | (Rp)          | %     | (Rp)        | %    |
| Belanja Pegawai | 1.001.705.000 | 994.340.000   | 99,26 | 7.365.000   | 0,74 |
| Belanja Barang  | 7.956.613.000 | 7.659.911.012 | 96,27 | 296.701.988 | 3,73 |
| Belanja Modal   | 185.268.000   | 185.028.811   | 99,87 | 239.189     | 0,13 |

Berdasarkan data pada tabel di atas, realisasi penyerapan anggaran Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi sampai dengan 31 Desember 2024 yaitu Belanja Pegawai sebesar 99,26%, Belanja Barang sebesar 96,27%, dan Belanja Modal sebesar 99,87%, sehingga realisasi tersebut telah melebihi target Triwulan IV 2024. Pagu dan realisasi anggaran pada masing-masing Bidang per 23 Oktober 2024 yaitu sebagai berikut:

| Bidang  | Pagu<br>(Rp) | Realisasi   |       | Sisa<br>(Rp) |
|---------|--------------|-------------|-------|--------------|
|         |              | (Rp)        | %     |              |
| PEP     | 538.922.000  | 481.599.644 | 89,36 | 57.322.356   |
| P2Humas | 606.142.000  | 577.731.254 | 95,31 | 28.410.746   |
| PIIP    | 927.818.000  | 881.379.505 | 94,99 | 46.438.495   |
| DP3     | 305.081.000  | 280.931.994 | 92,08 | 24.149.006   |
| KBP     | 152.987.000  | 144.904.567 | 94,72 | 8.082.433    |

### C. Efisiensi Pengguna Sumber Daya

Efisiensi SDM (Sumber Daya Manusia) merupakan tantangan di dalam Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi. Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi harus bisa membangun kinerja dengan penggunaan waktu dan sumber daya yang efektif. Efisiensi SDM, tidak hanya mengatur jumlah tenaga kerja di setiap posisi. Namun, efisiensi SDM juga tentang seluruh aspek usaha yang ada di dalam pencapaian IKU. Jika produktifitas sumber daya manusia pada suatu kantor tinggi, maka efisiensinya juga akan tinggi. Dapat dihitung juga dengan membandingkan antara input dan output. Namun, selain SDM banyak juga faktor yang bisa mempengaruhi produktivitas. Diantaranya yaitu : waktu dan biaya serta kondisi lingkungan. Karena kebanyakan faktor yang bersifat kualitatif, untuk bisa disederhanakan perhitungan rasio produktivitas, faktor tersebut biasanya diabaikan. Hanya faktor yang bersifat kuantitatif seperti waktu maupun biaya yang dijadikan pusat dalam menghitung produktivitasnya. Sehingga biasanya perhitungan produktivitas biasanya dilakukan secara parsial.

Misalnya perhitungan produktivitas biaya dan produktivitas kerja, dihitung secara terpisah. Memotivasi SDM dengan cara membuat lingkungan kerja yang nyaman, membangun komunikasi yang baik antar karyawan, menciptakan budaya inovasi, melakukan manajemen kinerja yang efektif, dan meningkatkan keterlibatan pegawai dalam kegiatan.

## BAB IV PENUTUP

---

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi Tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun 2019 yang disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah *juncto* Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan data, fakta, dan analisis terhadap kinerja Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi Tahun 2024, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Hal ini terlihat dari NKO yang dilaporkan sebesar 109,62. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari kontribusi seluruh pegawai, wajib pajak, masyarakat, dan seluruh *stakeholder*. Semoga di masa yang akan datang Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi mampu meningkatkan pelaksanaan tugas, pelayanan, kerja sama, dan kepercayaan masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan capaian penerimaan pajak.

# Lampiran

---

- 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024**
- 2. Laporan Kinerja Organisasi Tahun 2024**

**NILAI KINERJA ORGANISASI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANWIL DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI  
PERIODE PELAPORAN: S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024**

| Kode SS/IKU                              | Sasaran Strategis/<br>Indikator Kinerja Utama   | Target  | Realisasi | Polarisasi | V/C | Bobot IKU | Bobot Tertimbang | Indeks Capaian |
|--|---|---------|-----------|------------|-----|-----------|------------------|----------------|
| <i>Stakeholder Perspective</i>           |   |         |           |            |     |           | 30,00%           | 102,10         |
| 1  | Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal  |         |           |            |     |           |                  | 102,10         |
| 1a-CP                                    | Persentase realisasi penerimaan pajak   | 100,00% | 100,43%   | Max        | E/L | 26%       | 57,78%           | 100,43         |
| 1b-N                                     | Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas                | 100,00  | 104,38    | Max        | P/L | 19%       | 42,22%           | 104,38         |
| <i>Customer Perspective</i>              |   |         |           |            |     |           | 20,00%           | 100,00         |
| 2  | Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi  |         |           |            |     |           |                  | 99,69          |
| 2a-CP                                    | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)                    | 100,00% | 100,44%   | Max        | E/L | 26%       | 57,78%           | 100,44         |
| 2b-CP                                    | Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi        | 100,00% | 98,67%    | Max        | P/L | 19%       | 42,22%           | 98,67          |
| 3  | Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi  |         |           |            |     |           |                  | 100,30         |
| 3a-CP                                    | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)                  | 100,00% | 100,30%   | Max        | E/M | 21%       | 100,00%          | 100,30         |
| <i>Internal Process Perspective</i>      |   |         |           |            |     |           | 25,00%           | 118,51         |
| 4  | Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif  |         |           |            |     |           |                  | 114,49         |
| 4a-CP                                    | Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan                      | 74,00%  | 88,80%    | Max        | E/M | 21%       | 50,00%           | 120,00         |
| 4b-N                                     | Indeks efektivitas penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan   | 100,00% | 108,97%   | Max        | E/M | 21%       | 50,00%           | 108,97         |
| 5  | Pengawasan pembayaran masa yang efektif   |         |           |            |     |           |                  | 120,00         |
| 5a-CP                                    | Persentase pengawasan pembayaran masa   | 90,00%  | 120,00%   | Max        | P/M | 14%       | 100,00%          | 120,00         |
| 6  | Pengujian kepatuhan material yang efektif   |         |           |            |     |           |                  | 118,65         |
| 6a-CP                                    | Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan                             | 100,00% | 120,00%   | Max        | P/M | 14%       | 50,00%           | 120,00         |
| 6b-N                                     | Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu                             | 100,00% | 117,29%   | Max        | P/M | 14%       | 50,00%           | 117,29         |
| 7  | Penegakan hukum yang efektif  |         |           |            |     |           |                  | 119,88         |
| 7a-CP                                    | Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian   | 100,00% | 119,72%   | Max        | P/M | 14%       | 42,42%           | 119,72         |
| 7b-CP                                    | Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi   | 90,00%  | 116,46%   | Max        | P/L | 19%       | 57,58%           | 120,00         |
| 8  | Penanganan Upaya Hukum yang efektif   |         |           |            |     |           |                  | 118,06         |
| 8a-CP                                    | Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu   | 86,50%  | 99,60%    | Max        | P/M | 14%       | 40,00%           | 115,14         |
| 8b-N                                     | Persentase penanganan upaya hukum yang efektif  | 63,00%  | 87,16%    | Max        | E/M | 21%       | 60,00%           | 120,00         |
| 9  | Data dan Informasi yang berkualitas   |         |           |            |     |           |                  | 120,00         |
| 9a-N                                     | Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan | 100,00% | 120,00%   | Max        | P/M | 14%       | 42,42%           | 120,00         |
| 9b-N                                     | Persentase penghimpunan data regional dari ILAP   | 55,00%  | 88,38%    | Max        | P/L | 19%       | 57,58%           | 120,00         |
| <i>Learning &amp; Growth Perspective</i> |   |         |           |            |     |           | 25,00%           | 117,44         |
| 10                                       | Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif   |         |           |            |     |           |                  | 114,88         |
| 10a-N                                    | Tingkat Kualitas Kompetensi SDM   | 90,00   | 113,26    | Max        | P/M | 14%       | 33,33%           | 120,00         |
| 10b-N                                    | Indeks Penilaian Integritas Unit  | 100,00  | 117,71    | Max        | P/M | 14%       | 33,33%           | 117,71         |
| 10c-N                                    | Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko                                  | 90,00   | 96,25     | Max        | P/M | 14%       | 33,33%           | 106,94         |
| 11                                       | Pengelolaan keuangan yang akuntabel   |         |           |            |     |           |                  | 120,00         |
| 11a-CP                                   | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran  | 100,00  | 120,00    | Max        | P/M | 14%       | 100,00%          | 120,00         |
| <b>Nilai Kinerja Organisasi</b>          |   |         |           |            |     |           |                  | <b>109,62</b>  |

**RINCIAN LAPORAN NILAI KINERJA ORGANISASI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANWIL DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI**  
**PERIODE PELAPORAN: S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024**

| KODE IKU | NAMA IKU   | FORMULA IKU   | TARGET |              | REALISASI          |              | GAP                |        |
|----------|--|---|--------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------|
|          |  |   | %      | Angka Multak | %                  | Angka Mutlak |                    |        |
| 1a-CP    | Persentase realisasi penerimaan pajak  | Realisasi penerimaan pajak  | x 100% | 100,00%      | 13.454.628.438.000 | 100,43%      | 13.512.549.407.483 | 0,43%  |
|          |  | Target penerimaan pajak   |        |              | 13.454.628.438.000 |              |                    |        |
| 1b-N     | Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas         | (50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) +<br>(50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)  |        | 100,00       |                    | 104,38       |                    | 4,38   |
| 2a-CP    | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)             | Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM  | x100%  | 100,00%      | 12.456.567.923.000 | 100,44%      | 12.511.513.617.459 | 0,44%  |
|          |  | 75%   |        |              | 12.456.567.923.000 |              |                    |        |
| 2b-CP    | Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | 90%   | x 100% | 100,00%      |                    | 98,67%       |                    | -1,33% |
|          |  | Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan tahun pajak 2023  |        |              |                    |              |                    |        |
| 3a-CP    | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)           | 75%   | x 100% | 100,00%      | 998.060.515.000    | 100,30%      | 1.001.035.790.024  | 0,30%  |
|          |  | Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM   |        |              | 998.060.515.000    |              |                    |        |
| 4a-CP    | Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan               | {(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)}  |        | 74,00%       |                    | 88,80%       |                    | 14,80% |
| 4b-N     | Indeks efektivitas penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan  | 15%   |        | 100,00%      |                    | 108,97%      |                    | 8,97%  |
| 5a-CP    | Persentase pengawasan pembayaran masa  | (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) +<br>(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))   |        | 90,00%       |                    | 120,00%      |                    | 30,00% |
| 6a-CP    | Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan                      | (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) +<br>(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)) |        | 100,00%      |                    | 120,00%      |                    | 20,00% |
| 6b-N     | Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu                      | 30% Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan   |        | 100,00%      |                    | 117,29%      |                    | 17,29% |
| 7a-CP    | Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian  | "(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) +<br>(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)<br><br>Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%"   |        | 100,00%      |                    | 119,72%      |                    | 19,72% |

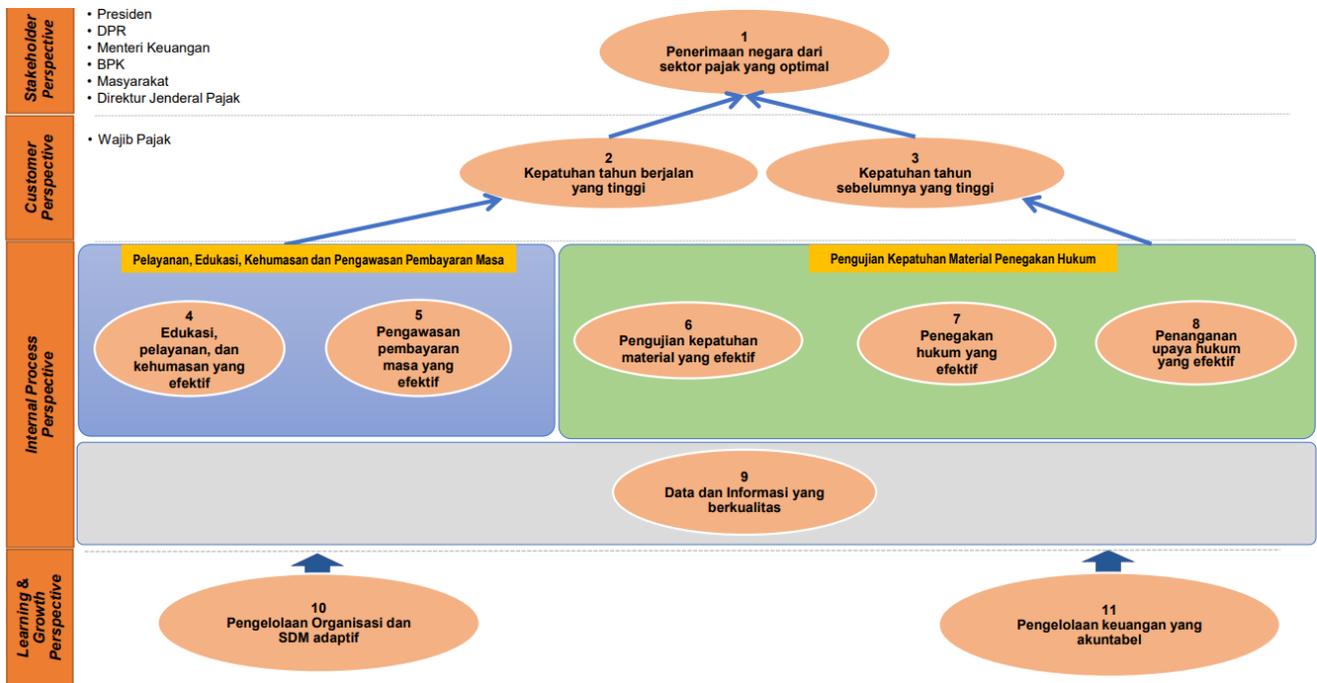
|        |   | Selain Kanwil DJP Wajib Pajak Besar   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |         |         |         |        |        |
|--------|---|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---------|---------|---------|--------|--------|
|        |   | 20% x   |  | +25% x   |  | +20% x  |  | +15% x   |  | +20% x  |  | x100%   |         |         |        |        |
|        |   | Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan Target Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan  |  | Realisasi Penyidikan Telah Selesai Target Penyidikan Telah Selesai |  | Jumlah Nilai Penyelesaian LPTFD Jumlah Realisasi Penyelesaian LPTFD |  | Realisasi Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum Target Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum |  | (50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (30% x Variabel Tindakan DSPC) + (20% x Variabel Pencairan DSPC) Target Tingkat Efektivitas Penagihan |  |         |         |         |        |        |
| 7b-CP  | Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi   |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |         | 90,00%  | 116,46% |        | 26,46% |
| 8a-CP  | Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu   | 50% Komponen penyelesaian Keberatan tepat waktu + 50% Komponen penyelesaian non Keberatan tepat waktu   |  |  |  |   |  |  |  |   |  | 86,50%  | 99,60%  |         | 13,10% |        |
| 8b-N   | Persentase penanganan upaya hukum yang efektif  | 40%   |  |  |  |   |  |  |  |   |  | 63,00%  | 87,16%  |         | 24,16% |        |
| 9a-N   | Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan | (Persentase produksi LHA Data Perpajakan + Persentase penyediaan data potensi perpajakan) / 2   |  |  |  |   |  |  |  |   |  | 100,00% | 120,00% |         | 20,00% |        |
| 9b-N   | Persentase pengumpulan data regional dari ILAP  | $\frac{70\% \times \left( \frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%}{30\% \times \left( \frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%}$   |  |  |  |   |  |  |  |   |  | 55,00%  | 88,38%  |         | 33,38% |        |
| 10a-N  | Tingkat Kualitas Kompetensi SDM   | (Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural x 30%) + (Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional x 35%) + (Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai x 35%)   |  |  |  |   |  |  |  |   |  | 90,00   | 113,26  |         | 23,26  |        |
| 10b-N  | Indeks Penilaian Integritas Unit  | $\left[ \left( \frac{\sum R}{75} \times 100\% \right) \times 80\% \right] + \left[ \left( \frac{R}{Q} \times 100\% \right) \times 15\% \right] + \left[ \left( \frac{S}{R} \times 100\% \right) \times 5\% \right] \times 40\%$ $\frac{((80\% \times \text{indeks pelayanan keberatan/penugangan}) + (20\% \times \text{indeks bukti permulaan/penyidikan}) - \text{Faktor Koreksi})}{85} \times 40\%$ $\left( \frac{\text{Total Indeks Penilaian Integritas Unit KPP}}{\text{Jumlah Unit KPP}} \right) \times 20\%$ <p> <span style="border: 1px solid orange; padding: 2px;">    </span> Formula Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI-WEK. Target komponen ini adalah 100. Maksimal capaian yang dapat dicapai 120, kemudian dikalikan pembobotan 40%.<br/> <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">    </span> Formula Indeks Penilaian Integritas di Kanwil. Target komponen ini adalah 85 dari skala 100. Maksimal capaian yang dapat dicapai 120, kemudian dikalikan pembobotan 40%.<br/> <span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">    </span> Formula Rata-rata Indeks Penilaian Integritas Unit (Tingkat Pemenuhan Unit KPP atas Penilaian Integritas). Target komponen ini adalah 85 dari skala 100. Maksimal yang dapat dicapai 120, kemudian dikalikan pembobotan 20%. </p> |  |  |  |   |  |  |  |   |  | 100,00  | 117,71  |         | 17,71  |        |
| 10c-N  | Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko                                  | Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko  |  |  |  |   |  |  |  |   |  | 90,00   | 96,25   |         | 6,25   |        |
| 11a-CP | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran  | Triwulan I s.d Triwulan III = 100% x IKPA dengan nilai IKPA 95,5% (Indeks 100)<br>Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0% (indeks 100)   |  |  |  |   |  |  |  |   |  | 100,00  | 120,00  |         |        |        |



**PERJANJIAN KINERJA**  
**NOMOR: PK-23/PJ/2024**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**SUMATERA BARAT DAN JAMBI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2024**

**Peta Strategi**

**Visi :**  
Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
SUMATERA BARAT DAN JAMBI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

| No. | Sasaran Program/Kegiatan                         | Indikator Kinerja   | Target |
|-----|--|---|--------|
| 1   | Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal | 01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak  | 100%   |
|     |  | 01b-N Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas              | 100    |
| 2   | Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi             | 02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)                 | 100%   |
|     |  | 02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | 100%   |
| 3   | Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi           | 03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)               | 100%   |
| 4   | Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif   | 04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan                   | 74%    |
|     |  | 04b-N Indeks kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan dan kehumasan                                       | 100%   |
| 5   | Pengawasan pembayaran masa yang efektif          | 05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa  | 90%    |
| 6   | Pengujian kepatuhan material yang efektif        | 06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan                          | 100%   |
|     |  | 06b-N Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu                           | 100%   |
| 7   | Penegakan hukum Yang efektif                     | 07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian  | 100%   |
|     |  | 07b-CP Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi                                       | 90%    |
| 8   | Penanganan upaya hukum yang efektif              | 08a-CP Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu                                      | 86.5%  |
|     |  | 08b-N Persentase penanganan upaya hukum yang efektif  | 63%    |



| No. | Sasaran Program/Kegiatan                    | Indikator Kinerja   | Target |
|-----|---|---|--------|
| 9   | Data dan informasi yang berkualitas         | 09a-N Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan | 100%   |
|     |   | 09b-N Persentase penghimpunan data regional dari ILAP   | 55%    |
| 10  | Organisasi yang berkinerja tinggi           | 10a-N Tingkat kualitas kompetensi SDM   | 90     |
|     |   | 10b-N Indeks Penilaian Integritas Unit  | 100    |
|     |   | 10c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko                                  | 90     |
| 11  | Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal | 11a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran   | 100    |

| Program/ Kegiatan Tahun 2024                    | Anggaran                |
|---|-------------------------|
| <i>A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara</i> | Rp 2.854.628.000        |
| 1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara             | Rp 457.485.000          |
| 2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi           | Rp 925.024.000          |
| 3. Pengawasan dan Penegakan Hukum               | Rp 829.098.000          |
| 4. Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan         | Rp 152.987.000          |
| 5. Pengawasan dan Penegakan Hukum               | Rp 490.034.000          |
| <i>B. Program Dukungan Manajemen</i>            | Rp 6.288.690.000        |
| 1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum          | Rp 4.987.569.000        |
| 2. Pengelolaan Organisasi dan SDM               | Rp 1.301.121.000        |
| <b>Total</b>                                    | <b>Rp 9.143.318.000</b> |

Padang, 31 Januari 2024  
Direktur Jenderal Pajak,

Padang, 31 Januari 2024  
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak  
Sumatera Barat dan Jambi,

Ditandatangani Secara Elektronik  
Suryo Utomo

Ditandatangani Secara Elektronik  
Etty Rachmiyanthi







Padang, 31 Januari 2024  
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak,

Ditandatangani Secara Elektronik  
Etty Rachmianthi